

## TUGAS AKHIR

### **KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
(A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

**FHERU MALIO**  
**NIM. 01870611240**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU  
2021**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : FHERU MALIO  
**NPM** : 01870611240  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

KETUA PRODI

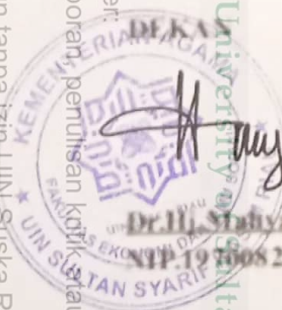
Sahwari Triandani, SE, M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Sahyarni, SE, MM  
NIP. 19680826 199903 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAMA** : FHERU MALIO  
**NIM** : 01870611240  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN  
**TANGGAL UJIAN** : 13 JULI 2021

**DISETUJUI OLEH :**

**PANITIA PENGUJI**

**Faiza Mukhlis,SE,M,Si.Ak.CA**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**

**PENGUJI I**

**Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si**  
**NIP. 19791127 200801 2 010**

**PENGUJI II**

**Irien Vicenda Anggriani, SE, M.Si**  
**NIP. 19751106 200710 2 003**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**  
**KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN**  
**BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI**  
**KABUPATEN PELALAWAN**

**OLEH : FHERU MALIO**

Penulisan tugas akhir ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten pelalawan yang beralamat di Jl.Sultan Syarif Hasyim,Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan. Pengamatan di instansi ini berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pajak BPHTB dan kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan, menunjukkan bahwa perkembangan pajak BPHTB di Kabupaten Pelalawan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sedangkan kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan tergolong kecil namun tidak mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan total penjumlahan tiga tahun terakhir rata-rata kontribusi yang diberikan selama sebesar 3,25%

**Kata Kunci:** Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN

OLEH : FHERU MALIO

*The writing of this final project was carried out at the Regency Regional Finance Agency Pelalawan having its address at Jl.Sultan Syarif Hasyim, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. Observations at this agency took place from March 2021 to June 2021. The writing of this final project was carried out with the aim of knowing the development of BPHTB taxes and BPHTB tax contributions to PAD in Pelalawan Regency. To obtain data and information, the authors use the method of interviews, observation and literature study. The data used are primary data and secondary data. In writing this final project, the author analyzes the data obtained by using a descriptive explanation. Based on observations made by the author at the Regional Finance Agency of Pelalawan Regency, it shows that the development of BPHTB taxes in Pelalawan Regency has fluctuated in the last three years. While the contribution of BPHTB taxes to PAD in Pelalawan Regency is relatively small but does not affect the financing of government administration. This is evidenced by the total sum of the last three years the average contribution given is 3.25%.*

**Key Word** : *Tax on Acquisition of Rights on Land and Buildings*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sehingga dapat berkarya tanpa batas sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan yang bermanfaat.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : **“Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pelalawan”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kendala, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta atas Ridho Allah SWT segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr.Mahyarni,SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Pembimbing Tugas Akhir Penulis Bapak Afrizal,S.Sos,M.Si. yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan, dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal mengerjakan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Diran dan Ibunda Jumaida yang selalu memberikan kasih sayang, inspirasi, motivasi, nasehat, dukungan, dan doanya. Serta membesarkan saya dengan segala pengorbanan tenaga, biaya, dan pikiran yang tentu tidak dapat penulis balas;
6. Rekan-rekan seperjuangan Kelas Perpajakan A 2018 yang memberikan dukungan dan doa;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala bantuan yang telah diberi.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak yang membutuhkan.

Lubuk Raja, 30 maret 2021

Penulis,

**FHERU MALIO**  
NIM. 01870611240

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Metode Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	13
2.2. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan .....	15
2.3. Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	16
2.4. Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	17
2.5. Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan .....	17
2.6. Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan .....	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan .....	18
---	----

### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1. Tinjauan Teori .....	22
3.1.1. Pengertian Pajak .....	22
3.1.2. Fungsi Pajak .....	23
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak .....	23
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak .....	25
3.1.5. Kontribusi .....	26
3.1.6. Pengelompokan Pajak .....	27
3.1.7. Sanksi di Bidang Perpajakan .....	28
3.1.8. Pengertian Pajak Daerah .....	29
3.1.9. Jenis-jenis Pajak Daerah .....	29
3.1.10. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	32
3.1.11. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah .....	33
3.1.12. Pajak BPHTB .....	35
3.1.13. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak .....	44
3.1.14. Pajak Menurut Islam .....	44
3.2. Tinjauan Praktik .....	49
3.2.1. Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah ...	49
3.2.2. Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan .....	52

3.2.3. Faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh.. 54

## **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Pendapatan Pajak Daerah.....	5
Tabel 1.2: Target dan Realisasi Pajak BPHTB .....	6
Tabel 3.1: Kontribusi Pajak BPHTB.....	50



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lubuk Raja..... 21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan Wajib Pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan Warga Negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada era otomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 Pemerintah menghendaki Daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaannya yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak dan Badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah: Pajak Provinsi & Pajak Kabupaten/Kota

Dalam melakukan Pembangunan suatu Daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan yang paling besar untuk membangun Daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Dengan pesatnya perkembangan komunikasi dan IT pemerintah kabupaten pelalawan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan pelayanan khususnya pelayanan pajak daerah kabupaten pelalawan.

Pada pajak BPHTB pemerintah kabupaten pelalawan berinovasi untuk menggunakan sistem BPHTB yang terintegrasi dengan BPN dan KPP Pratama, dalam inovasi ini BPKAD mengembangkan pelayanan menggunakan sarana online melalui perangkat android baik pendaftaran pajak BPHTB maupun dalam rentang administrasi verifikasi dan penandatanganan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan. Sehingga terciptalah sistem BPHTB online.

Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 85 sampai dengan Pasal 93.

Dalam pemungutan Pajak sangat diperlukan Peranan Aparat Pemerintah Daerah, dalam mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(BPHTB) agar seluruh warganya yang menjadi Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pelalawan yang kemudian disingkat menjadi BPKAD merupakan gabungan dari dinas pendapatan daerah, bagian keuangan daerah dan bagian aset daerah yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah yang berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi satu perangkat kerja pemerintah. Salah satu tugas pokok dan fungsi BPKAD kabupaten pelalawan adalah meningkat pelayanan secara optimal dalam mengelola, mencari, menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuang. daerah terutama yang berasal dari pendapatan daerah yang sumbernya berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang turunannya dituangkan kedalam peraturan daerah kabupaten pelalawan no 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPKAD sebagai kantor public service atau penyedia layanan pajak daerah bertanggung jawab atas penerimaan pajak daerah khususnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari sektor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pada tanggal 17/02/2020 dikutip dari halloriau.com Kepala BPKAD kabupaten pelalawan Devitson,SH,MH mengatakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan akan menggenjot Pendaptan asli daerah (PAD) dari 11 sektor salah satunya dari Bea perolehan atas tanah dan bangunan yang mana realisasinya mencapai 105,70 persen yaitu sebesar Rp 21,1 meliar dari target 20 miliar.

**Tabel 1.1**

**Pendapatan Pajak Daerah  
Kabupaten Pelalawan Tahun 2018-  
2020**

No.	Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)
1.	2018	56.100.940.000,00
2.	2019	56.399.398.000
3.	2020	71.729.900.000,00

**Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan(2020)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	2018	4.400.000.000,-	10.642.466.190,-	241,8%
2.	2019	20.000.000.000,-	21.140.386.517,-	105,70%
3.	2020	9.500.000.000,-	11.313.300.169	119,08%

**Sumber : BPKAD Kabupaten Pelalawan.**

Berdasarkan tabel diatas,dijelaskan bahwa Realisasi Pajak BPHTB dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Dibuktikan dari jumlah pajak BPHTB Tahun 2018 sebesar 241,6% dari target pajak BPHTB sebesar Rp4.400.000.000, realisasi yang diberikan pada 2018 masuk dalam kriteria sangat tinggi. Tahun 2019 target pajak sebesar Rp20.000.000.000 Realisasi yang diberikan pada tahun 2019 sebesar 105,7%. Jumlah kontribusi tersebut masuk kriteria yang sangat rendah dari pada tahun sebelumnya. Tahun 2020 realisasi pajak sebesar Rp11.313.300.169 Jumlah Data ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikakan pajak BPHTB mengalami kenaikan Yang cukup tinggi.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.” Apabila Pajak BPHTB mengalami penurunan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan, maka kontribusi pajak BPHTB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan, terhambatnya penyelenggaraan roda pemerintahan dan roda pembangunan, menurunnya tambahan pegawai negeri, menurunnya kesejahteraan pegawai dan masyarakat. Sebaliknya jika Pajak BPHTB mengalami peningkatan terhadap target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan maka kontribusi terhadap pajak BPHTB berarti semakin besar peranan pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat penyelenggaraan roda pemerintahan dan roda pembangunan, meningkatnya tambahan pegawai negeri dan meningkatnya kesejahteraan pegawai dan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dianalisis kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.

Melalui tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan, dan untuk mengenal lebih luas tentang objek masalah yang tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi juga mengacu pada praktik kerja lapangan dan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul



## “Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana tata cara pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan ?
3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi serta solusi apa yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten pelalawan untuk meningkatkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti.
2. Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia.

### 1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021.

### 1.4.3. Jenis Data

#### 1.4.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.



### 1.4.3.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

### 1.4.4. Metode Pengumpulan Data

#### 1.4.4.1. Interview

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview. Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun penelitian.

#### 1.4.4.2. Observasi

Observasi secara umum adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan serta gagasan. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan meninjau langsung di lokasi penelitian guna membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Penulis secara langsung mengamati dengan melihat secara dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

#### 1.4.4.3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih



berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber- sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

#### **1.4.4. Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu mengolah data-data yang telah di dapat dan membandingkan masalah teori dan praktik dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan.

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara perizinan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan , tata cara pemungutan pajak bea perolehan hak atas





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah dan bangunan, jenis- jenis pajak, pengertian pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, subjek dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tariff pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, perhitungan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tinjauan praktek tata cara pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

##### Kabupaten Pelalawan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan BPKAD Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

- A. Kepala Badan; membawahi Sekretaris dan 6 (enam) bidang, yaitu:
  1. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah;
  2. Bidang Perbendaharaan;
  3. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan;
  4. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah
  5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding
  6. Bidang Aset;
- B. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  1. Subbagian Program
  2. Subbagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, membawahi 3 Sub Bidang yaitu :
  1. Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub bidang Pelaksanaan Anggaran.
3. Sub bidang Informasi Keuangan Daerah.
- D. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
  1. Sub bidang penerimaan dan pengeluaran.
  2. Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan.
  3. Sub bidang Belanja PPKD.
- E. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
  1. Sub bidang Penatausahaan Keuangan.
  2. Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan
  3. Sub bidang Bina

**2.2. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten**

**Pelalawan.**

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, Badan Pengeolan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan menetapkan visi ***“(Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera))”***.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.3. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten**

#### **Pelalawan.**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu;
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan;
3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa;
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan;
7. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pencapaian misi Secara umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

## 2.5. Tugas

Badan Pengeolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

## 2.6. Fungsi

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
4. pelaksanaan kesekretariatan Badan ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.7. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan.

#### 2. Sekretaris

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan perencanaan serta evaluasi pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian. dan membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian, yaitu :

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah

Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, memfasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD, melakukan pembinaan dan evaluasi rancangan anggaran kabupaten.

Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah membawahi 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer
- b. Sub bidang Pelaksanaan Anggaran.
- c. Sub bidang Informasi Keuangan Daerah.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Penerimaan, Pengeluaran, Verifikasi, Pelaporan dan Belanja PPKD.

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- a. Sub bidang penerimaan dan pengeluaran.
- b. Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan.
- c. Sub bidang Belanja PPKD.

5. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Pembukuan dan Bina Keuangan.



membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- a. Sub bidang Penatausahaan Keuangan.
- b. Sub bidang Akuntansi dan Pembukuan
- c. Sub bidang Bina Keuangan

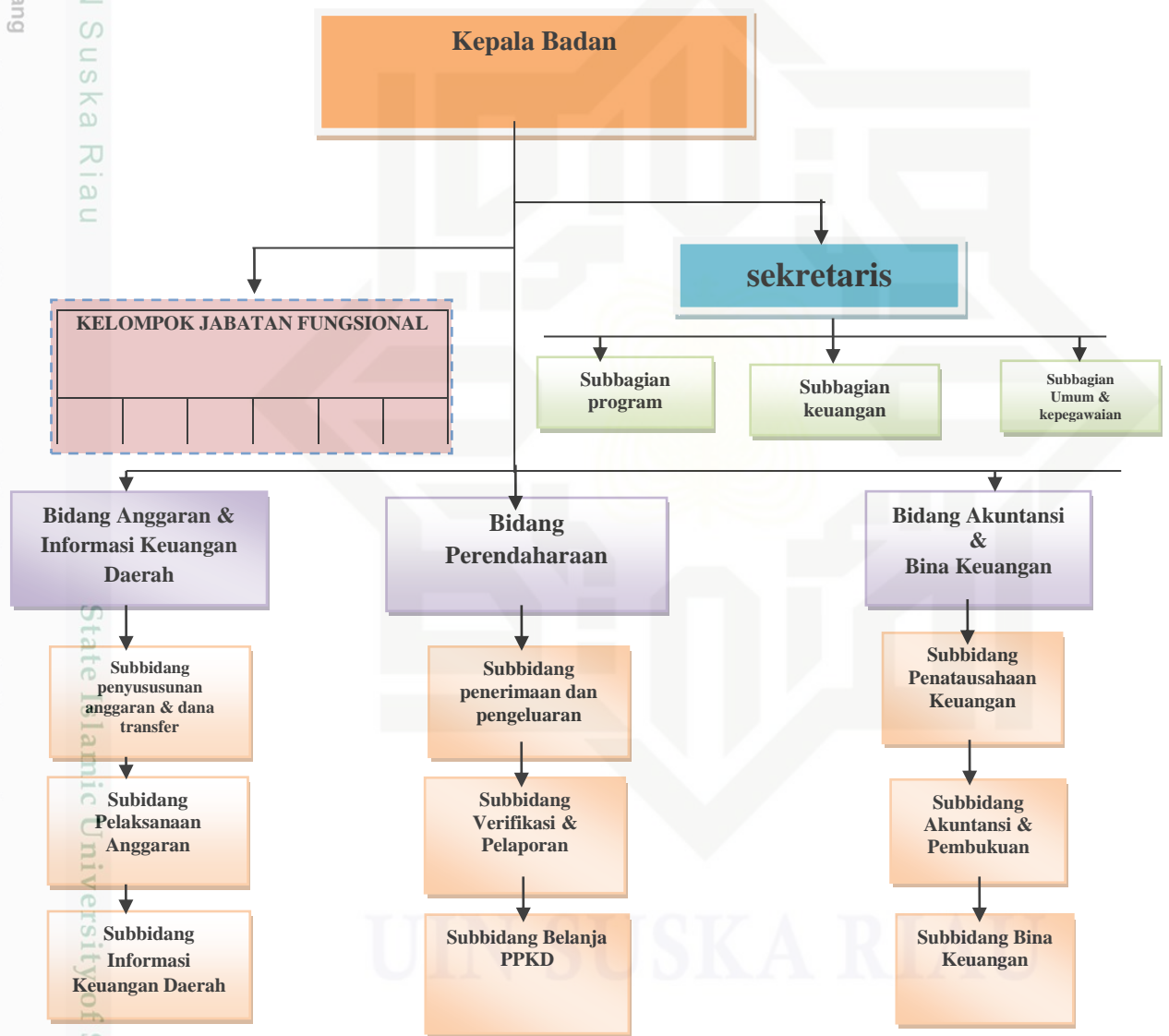


- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH

Lampiran : Peraturan Bupati Pelalawan

Nomor : 78 Tahun 2016



**GAMBAR 2.1**

**Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan (2020)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- 1) Perkembangan pajak BPHTB dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi.

Dalam hal perkembangan pajak BPHTB sekaligus mempengaruhi kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan. Tahun 2018 kontribusi yang diberikan sebesar 7,96% dengan penerimaan pajak BPHTB sebesar Rp10.642.466.190, kontribusi yang diberikan pada 2018 masuk dalam kriteria rendah. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp21.140.386.517 Kontribusi yang diberikan pada tahun 2019 terhadap PAD sebesar 14,73%. Jumlah kontribusi tersebut masuk kriteria yang sangat tinggi dari pada tahun sebelumnya. Tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp11.313.300.169 Kontribusi yang diberikan pada tahun 2020 terhadap PAD sebesar 7,05%. Jumlah Data ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan pajak BPHTB mengalami kenaikan Yang sangat tinggi.

- 2) Kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan selama tiga tahun terakhir sebesar 0,34% dan masuk kriteria kecil dalam kontribusinya. Hal tersebut terjadi karena kontribusi yang diberikan pajak BPHTB terhadap PAD mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Walaupun

kontribusi pajak BPHTB masih kecil terhadap PAD akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

#### 4.2. Saran

- a. Untuk BPKAD sebaiknya memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat (Sosialisasi dengan Wajib Pajak) mengenai dasar penetapan Pajak BPHTB, perhitungan Pajak BPHTB kepada Wajib Pajak agar dapat mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak BPHTB.
- b. Pemungutan Pajak BPHTB harus lebih ditingkatkan lagi mulai dari pendataan hingga penyetorannya.
- c. Untuk Pemerintah Daerah sebaiknya membuat kebijakan pengurangan tarif pajak.
- d. Untuk wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, dibutuhkan masukan yang positif kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan cara mengikuti seminar perpajakan, bertanya dengan call center, inovasi informasi dalam website dan sosialisasi untuk menambah pengetahuan tentang pajak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan cara agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- e. Untuk Wajib Pajak diharapkan lebih produktif dengan memberikan data-data atau dokumen yang benar-benar untuk mendukung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan Pajak BPHTB agar dapat berjalan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Empat. Sari, Diana. *Konsep Dasar Perpajakan Bandung* : Refika Aditama. <http://Www.Badankebijakanfiskal>. Penjelasan Umum Bphtb.Htm

<http://www.pajak.go.id>

Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 tentang *Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB*.

Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.04/2000 *tentang Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB*.

Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.03/2004 *tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*. Yogyakarta: Andi.

Pahala Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Rajawali Pers  
*Pajak Dalam Perspektif Islam*, diakses dari (<https://www.academia.edu/36591535/> *Pajak\_dalam\_perspektif\_islam*), pada 28 Maret 2021.

*Pajak, Haramkah?* Diakses dari (<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>), pada 6 maret 2021.

Peraturan daerah.no: 01 tahun 2011 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba

Sumitro Rahmat dan Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Penerbit Andi :Yogyakarta. Undang-undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000. *Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah*.

Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan.*

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Bimbingan Laporan Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
5. Lampiran 5 : Biografi Penulis

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan Pajak BPHTB di Kabupaten pelalawan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir?

Jawab : Perkembangan pajak BPHTB dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Kondisi ini dikarenakan belum stabilnya penerimaan dari pendapatan di sektor pajak BPHTB tersebut.

2. Bagaimana kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan?

Jawab : Kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Pelalawan tergolong kecil namun tidak mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

3. Apa saja faktor yang menghambat penerimaan pajak BPHTB?

Jawab : Adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Badan Keuangan Daerah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB, diantaranya yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta © UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1979/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 23 Maret 2021 M  
9 Sya'ban 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Fheru Malio  
NIM. : 01870611240  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pelalawan". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Sa'd HM, M.Ag, MM  
NIP. 196205121989031003



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2096/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**  
 Pekanbaru, 26 Maret 2021 M  
 12 Sya'ban 1442 H

Kepada  
 Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Fheru Malio  
 N I M : 01870611240  
 J u r u s a n : D-III Perpajakan  
 S e m e s t e r : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pelalawan"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA  
 NIP. 1951112 199903 2 001

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/40204  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1979/2021 Tanggal 23 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

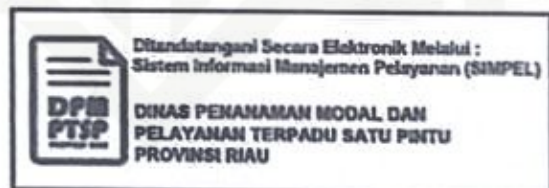
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | HERU MALIO  |
| 2. NIM /KTP          | : | 01870611240   |
| 3. Program Studi     | : | PERPAJAKAN  |
| 4. Jenjang           | : | DIII  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Maret 2021



**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, atau untuk keperluan lain.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of  
 Ar-Raniry Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis lahir di Lubuk Raja pada tanggal 30 Desember 2000, Merupakan putra dari Ayah yang bernama Diran dan ibu bernama Jumaida. Penulis mengawali pendidikan di SDN 004 Lubuk Keranjii pada tahun 2006-2012, setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMPN 1 Bandar Petalangan pada tahun 2012-2015, kemudian penulis melanjutkan Sekolah di SMAN 1 Pangkalan Kerinci pada tahun 2015-2018. Dan di tahun

2018 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kepala Desa Lubuk Raja Kabupaten Pelalawan selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : **“KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.